BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan mengenai prosedur koreksi diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penyebab terjadinya kesalahan Surat Pertanggungjawaban yaitu pergantian bendahara dan Sumber Daya Manusia yang sudah terbiasa menggunakan sistem yang lama
- b. Kesalahan-kesalahan yang dapat dikoreksi oleh SBPK meliputi pajak (koreksinya dengan mengurangi saldo sebesar yang salah input), kode rekening/kode kegiatan (koreksinya dengan menambah realisasi sebesar yang salah input), nilai nominal (koreksinya dengan menambah realisasi sebesar selisih yang salah input).
- c. Koreksi Surat Pertanggungjawaban dilakukan SBPK menggunakan sistem yang ada yaitu SIPKD
- d. Berita Acara Permintaan Pembatalan Data SPJ yang diserahkan kepada pihak SBPK, harus sudah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait (PPTK, Kepala SKPD, paraf staf Subbid Kas Bank & Akuntansi, Kasubbid Kasi Bank & Akuntansi, dan Kepala SBPK) dan pada Surat Permohonan juga sudah ada tandatangan Kepala SKPD. Setelah semua tanda tangan lengkap, pihak SKPD baru bisa melakukan koreksi.
- e. Setelah dilakukan koreksi akan ada perbedaan pada Buku Kas Umum dan Laporan Realisasi Belanja.